

PERSPEKTIF PRAGMATIK, LINGKUNGAN DAN SOSIAL DALAM LAPORAN KEUANGAN: Peningkatan Kegunaan dan Pertanggungjawaban

Kumalahadi*

Laporan keuangan selama ini diklaim sebagai laporan untuk pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban. Peran laporan keuangan untuk pengambilan keputusan didasarkan pada information usefulness. Untuk meningkatkan usefulness informasi dalam laporan keuangan diperlukan informasi forward looking dan informasi nonfinansial. Sedangkan peran laporan keuangan untuk pertanggungjawaban sudah lama diketahui. Tetapi seiring dengan perkembangan kecerdasan masyarakat, tuntutan masyarakat kepada perusahaan juga semakin banyak. Tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan yang selama ini kurang mendapatkan perhatian, perlu secara serius di atur dalam standar akuntansi, sehingga isu lingkungan dimasukkan dalam laporan keuangan dalam bentuk di accrued maupun dalam bentuk Disclosure. Sedangkan format khusus diperlukan untuk laporan pertanggungjawaban sosial. Hal ini didasarkan pada isu survival; yaitu keberadaan perusahaan harus sesuai dengan kehendak masyarakat dan mendapatkan legitimasi dari mereka. Di samping itu, masyarakat perlu dilibatkan dalam hal yang menyangkut nasib hidupnya.

PENDAHULUAN

Laporan keuangan selama ini terus disempurnakan, tetapi hasilnya nampak sangat lambat. Sementara pengembangan akuntansi telah berkembang secara parsial. Akuntansi keuangan nampak sebagai bidang tersendiri yang paling lambat. Hal ini bisa dipahami, karena akuntansi keuangan langsung berhubungan dengan praktik yang sarat dengan kepentingan. Sedangkan akuntansi lingkungan dan akuntansi sosial berjalan sendiri seakan-akan sebagai disiplin tersendiri, bahkan ingin memasukkan akuntansi keuangan sebagai bagiannya. Paper ini membahas mengenai (1) perspektif pragmatik laporan keuangan, yaitu upaya untuk meningkatkan kegunaan laporan keuangan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan ekonomi, (2) perspektif lingkungan: yaitu upaya untuk meningkatkan kegunaan laporan keuangan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan isu lingkungan, dan (3) perspektif sosial; yaitu upaya untuk meningkatkan laporan keuangan untuk pertanggungjawaban sosial.

PERSPEKTIF PRAGMATIK

Laporan keuangan menurut SFAC no. 1 digunakan untuk pertanggungjawaban dan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan

* adalah Dosen Tetap Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta yang saat ini sedang menyelesaikan S3 di Program Pascasarjana UGM

SFAC No. 2 mensyaratkan laporan keuangan harus memenuhi kualitas *usefulness*. Untuk memenuhi kualitas *usefulness* tersebut diperlukan banyak informasi sesuai dengan kebutuhan *user*, sehingga diterbitkan SFAC No. 5 yang mencakup laporan keuangan dan pelaporan keuangan.

Laporan keuangan selama ini telah menerima banyak kritik. Tetapi ternyata dalam praktik, laporan keuangan hanya berubah sedikit. Dasar *historical cost* dan alokasi masih dianggap paling praktis. Banyak kritik yang menunjukkan bahwa metode akuntansi yang berbeda-beda menghasilkan angka akuntansi yang berbeda. Namun dari hasil penelitiannya Foster (1986:152-153) menunjukkan bahwa perbedaan angka akuntansi hasil metode akuntansi yang berbeda secara statistik tidak signifikan. Artinya perbedaan angka akuntansi akibat perbedaan metode akuntansi, masih memiliki interpretasi yang sama. Di samping itu alokasi walaupun mendapat banyak kritik, tetapi malah berfungsi sebagai *smoothing*, sehingga angka akuntansi lebih mudah digunakan untuk menggambarkan trend. Akibatnya daya prediksi akuntansi menjadi lebih baik.

Namun *user* masih saja tidak puas terhadap informasi laporan keuangan yang dinilai sebagai *old news*. Banyak peneliti yang menyatakan ketidakpuasannya dengan perkembangan akuntansi yang didasarkan pada *information usefulness*. Banyak literatur akuntansi menyatakan bahwa laporan keuangan saat ini tidak menyajikan informasi yang sangat diinginkan oleh investor (Gray, 1994: 17-45; Lee, 1978; Puxty and Laughlin, 1983:1-51). *Decision usefulness* juga gagal untuk membedakan antara *information needs* dengan *information wants* (Sterling, 1972:198-208). Dalam hubungannya penelitian akuntansi yang berhubungan dengan pasar modal yang semakin banyak, Lev (1989:173) menyatakan bahwa respon pasar pada *bad news* dan *good news* dalam *earning* cukup kecil, bahkan setelah pengaruh peristiwa *economy wide* dimasukkan, variabilitas *abnormal return* yang dapat diatribusi dengan *earning* hanya 2 - 5% pada *narrow window*, sedangkan pada *window* yang lebih luas kontribusinya lebih besar tetapi masih jauh di bawah 20%. Dengan demikian sebagian besar *return* sekuritas dipengaruhi sebagian besar oleh faktor-faktor selain perubahan *earning*.

Sedangkan untuk pertanggungjawaban laporan keuangan hanya menyokong sistem kapitalis yang menyajikan informasi finansial kepada investor dan kreditor. Informasi kepada masyarakat dan informasi tentang lingkungan merupakan isu yang sedang kontroversial dalam pengembangan laporan keuangan untuk pertanggungjawaban. Laporan keuangan secara umum telah banyak menjadi obyek penelitian. Namun demikian masih saja banyak pihak yang tidak puas dengan praktik akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan tersebut, sehingga cakupan standar akuntansi dalam SFAC No. 5 (1985) diperluas tidak hanya laporan keuangan dan catatan atas laporan

keuangan, tetapi juga mencakup *supplementary information* yang disebut sebagai pelaporan keuangan. Di samping itu terdapat pelaporan keuangan yang tidak dipengaruhi oleh FASB yaitu isi pelaporan keuangan yang tercakup dalam alat-alat lain pelaporan keuangan seperti MD & A (*Management Discussion & Analysis*). Informasi lainnya juga biasa dimasukkan dalam pelaporan keuangan seperti laporan analisis, statistik ekonomi dan sebagainya. Di samping itu laporan keuangan sebagai media pertanggungjawaban masih terlalu sempit, yaitu hanya kepada pemegang saham saja.

Berikut ini diuraikan tentang upaya-upaya penyempurnaan laporan keuangan. Urutan pembahasan diawali dengan upaya untuk meningkatkan kegunaan informasi laporan keuangan, selanjutnya dibahas tentang isu lingkungan dan terakhir dibahas mengenai pertanggungjawaban sosial.

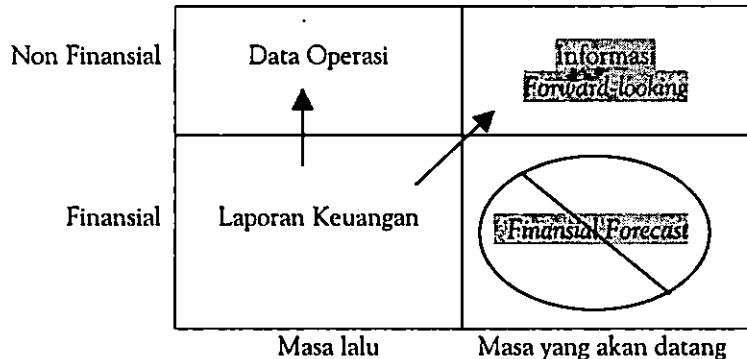
Upaya Penyempurnaan dan Peningkatan Kegunaan Laporan Keuangan

Upaya AICPA untuk memenuhi tuntutan para penggunanya telah membentuk Komite Jenkins yaitu komite khusus AICPA untuk memperbaiki *financial reporting*. Komite Jenkins tersebut telah menyelesaikan tugasnya dengan menghasilkan laporan *improving business reporting a customer focus*. Ternyata hasil pekerjaan Komite Jenkins ini menarik perhatian setiap orang yang mempunyai kepentingan dengan *business reporting*.

Memang user utama laporan keuangan (investor dan kreditor) selama ini menganggap bahwa laporan keuangan tersebut mengandung *good news* dan *bad news*. *Good news* maksudnya laporan keuangan dipandang sebagai komponen yang penting dari informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan kredit dan investasi, sedangkan *bad news* maksudnya laporan keuangan tidak dapat memenuhi kebutuhan informasi kunci sehingga mereka memandang bahwa *financial reporting* masih berguna tetapi harus diperbaiki (Noll and Weygandt 1997: 47).

Pelaporan keuangan yang diperluas menjadi pelaporan keuangan yang lebih sempurna sesuai usulan Komite Jenkins disebut *business reporting*. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan yang terus menerus pada *output* proses akuntansi khususnya laporan keuangan. Model *business reporting* yang diusulkan oleh Jenkin adalah model *business reporting* yang komprehensif yaitu mencakup informasi finansial dan informasi non finansial serta mencakup informasi masa lalu dan informasi yang akan datang (Noll and Weygandt, 1997:48). Informasi finansial masa lalu adalah laporan keuangan, sedangkan informasi masa lalu non finansial adalah data operasi. Informasi masa yang akan datang hanya mencakup informasi non finansial yaitu informasi yang mempunyai nilai prediksi (*forward working information*). Informasi finansial masa yang akan datang

dalam bentuk finansial *forecast* tidak direkomendasi. Untuk lebih jelasnya dibawah ini Noll and Weygandt (1997:48) menggambarkan model *business reporting* yang komprehensif yang diusulkan oleh Jenkin.



Dalam sosialisasi modelnya Jenkin, AICPA telah menyelenggarakan simposium yang dihadiri oleh user laporan keuangan, perusahaan penyusun laporan keuangan, akuntan publik, akademisi, *standard setter* dan regulator Amerika dan Kanada untuk membahas elemen-elemen model komprehensif yang diusulkan. Simposium tersebut telah memberikan fokus pada 3 hal utama: (1) apa yang menjadi kesepakatan dan ketidaksepakatan elemen informasi non finansial dalam model yang diusulkan, (2) apa yang menjadi kesepakatan dan ketidaksepakatan elemen informasi *forward looking* dalam model yang diusulkan dan (3) langkah apa yang harus dilakukan berikutnya dalam hubungannya dengan informasi yang diusulkan dalam model yang komprehensif. Jelas bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut didominasi oleh pertanyaan mengenai elemen-elemen informasi non finansial dan informasi *forward looking* (Noll and Weygandt, 1997:49).

Respon dari pertanyaan tersebut menyatakan bahwa sebagian besar responden sepakat bahwa informasi non finansial dan *forward looking* adalah penting untuk menilai peluang dan resiko. Dengan kata lain para user memerlukan informasi tersebut untuk membuat *informed decisions*. Di samping itu disepakati bahwa pelaporan keuangan harus mampu memenuhi kebutuhan para *customer*.

Memang model *business reporting* yang diusulkan oleh Jenkin menjadi lebih luas. Di samping itu informasi non finansial dan informasi *forward looking* mencapai cakupan yang sangat luas dan sangat bervariasi satu perusahaan dengan perusahaan lain. Untuk itu masalahnya adalah apakah pencantuman informasi non finansial dan informasi *forward looking* dalam model *business reporting* perlu diatur dengan standar atau tidak diatur dengan standar. Memang selalu ada

alasan nya apakah memilih perlu standar atau memilih tidak perlu standar. Tetapi mengingat adanya variasi informasi yang relevan pada setiap kelompok perusahaan, maka sebaiknya dipilih yang tidak perlu diatur oleh standar. Biarkan pasar memutuskan sendiri, informasi apa yang diperlukan. Di samping itu dikembangkan *disclosure* yang paling baik memenuhi kebutuhan *user*; yaitu *disclosure* yang harus dikembangkan berdasarkan industri dan mendorong (tidak mensyaratkan) setiap perusahaan men-*disclose* data yang diperlukan *user* untuk membuat *informed decision*. Dari sini pasar akan memberikan *reward* dalam bentuk penilaian yang baik bagi perusahaan yang menyediakan informasi yang paling baik. Metodologi ini akan memberikan fleksibilitas bagi perusahaan untuk melaporkan informasi *non finansial* dan *forward looking*. Berikut ini Noll and Weygandt (1997:50) menyatakan bahwa dalam elemen-elemen model *business reporting* yang diusulkan oleh Jenkin adalah sebagai berikut:

1. Data finansial dan non finansial
 - Laporan keuangan dan *disclosure* yang berhubungan dengan laporan keuangan.
 - Data operasi *high level* dan pengukuran prestasi yang digunakan manajemen untuk mengelola *business*
2. Analisis manajemen terhadap data finansial dan non finansial
 - Alasan terhadap perubahan-perubahan dalam keuangan, operasi dan kinerja dan *trend* kunci dari pengaruh masa lalu.
3. Informasi *forward looking*
 - Peluang dan resiko, mencakup hasil dari *trend* kunci
 - Rencana manajemen, mencakup faktor kesuksesan kunci
 - Perbandingan prestasi *business* nyata dengan *disclose* peluang, resiko dan rencana manajemen
4. Informasi manajemen dan pemegang saham
 - Direksi, manajemen, kompensasi, pemegang saham utama dan transaksi serta hubungan diantara *related parties*
5. *Background* perusahaan
 - Tujuan umum dan strategi
 - Cakupan dan deskripsi bisnis dan *properties*
 - Pengaruh struktur industri pada perusahaan

Sementara itu selaras dengan ekonomi yang berkembang sangat pesat, pemakai laporan keuangan juga semakin maju, sehingga mereka tidak hanya memerlukan informasi keuangan yang tradisional saja, tetapi juga memerlukan informasi-informasi lain (kualitatif) yang relevan (Drucker, 1995:26-27). Bila semua tuntutan masyarakat dipenuhi, sejalan

dengan usaha komite Jenkin tentu bentuk laporan keuangan akan semakin sesuai dengan kebutuhan user.

Perspektif Lingkungan - Akuntansi dan Disclosure Masalah Lingkungan

Menurut Paul Munter, Rene Sacasas and Elaine Garcia (1996:36-50) masalah lingkungan tidak hanya dihadapi oleh perusahaan besar saja tetapi juga oleh perusahaan kecil. Di USA telah diatur upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan, misalnya : setelah pom bensin ditutup harus dilakukan perbaikan tanah yang dicemari minyak. Bengkel mobil harus menjaga limbah oli agar tidak mencemari tanah. Dengan demikian masalah lingkungan menjadi masalah yang sangat luas, yaitu masalah bagi perusahaan besar, perusahaan kecil dan masyarakat luas.

Akuntansi dalam menanggapi masalah ini masih sangat terbatas, seakan-akan isu lingkungan ini merupakan masalah kecil. Agar pertimbangan isu lingkungan ini sedikit lengkap dapat dipahami, perlu diketahui perkembangan aturan lingkungan di USA. Menurut Munter, Sacasas dan Garcia (1996:36-50) perkembangan aturan lingkungan di USA adalah:

Undang-undang (UU) lingkungan di USA bermula di penghujung tahun 1950-an baik di tingkat lokal, *state* dan *federal*. Undang-undang tersebut dimaksudkan untuk menurunkan polusi air dan udara. Pada perkembangan di dasawarsa berikutnya, undang-undang lingkungan tersebut disempurnakan dan ditambah sesuai dengan tuntutan masyarakat. *Environmental protection agency* (EPA) dibentuk 1970 untuk bertanggung jawab terhadap masalah undang-undang lingkungan di tingkat *federal* untuk mengatur polusi udara dan air, buangan sisa tanah, *supply* air, pengendalian pestisida dan radiasi dan *ocean dumping*. Pada perkembangan berikutnya EPA ini diperluas untuk mencakup masalah polusi yang lain seperti buangan sisa *toxic* dan hujan asam.

Secara umum masalah lingkungan mencakup polusi udara, polusi air dan buangan sisa. Polusi udara meliputi hujan asam, urban smog, *toxin* yang naik ke udara, penipisan ozon dan masalah-masalah lain. Walaupun masalah-masalah tersebut dihadapi oleh perusahaan besar namun telah terjadi perubahan definisi *polluter*, seperti toko cat dan *bakery* saat ini masuk kategori sebagai *polluter* sebagaimana penghasil *sulfur dioxide*. Tetapi anehnya perusahaan tidak dilarang menjual fasilitas yang menghasilkan polusi. Polusi air mencakup segala buangan ke sungai dan yang mencemari air tanah sehingga undang-undang air bersih secara umum mensyaratkan perusahaan untuk memasang alat pengendali untuk pengendalian polusi air. UU polusi air menjangkau tidak hanya perusahaan besar, tetapi juga perusahaan

kecil, dalam industri konstruksi, pertanian, *dry cleaning*, *mining* sampai pada taman hiburan. Buangan sisa dapat berupa sampah atau sisa apa saja yang mencemari lingkungan. Buangan sisa dapat merusak tanah, air minum dan kesehatan.

Pada tahun 1980 *Congress* mengesahkan *comprehensive environmental response compensation and liability act* (CERLA) atau *superfund* untuk mengatur masalah kerusakan tempat akibat buangan sisa yang tidak terkendali yang semakin meningkat. Di bawah *Superfund*, menurut Beth, McNichols and Wilson (1997:72-81) EPA melakukan (1) identifikasi dan penilaian tempat yang rusak akibat bahan yang merusak lingkungan ditumpahkan, disimpan atau dibuang di tempat tersebut (2) menentukan *Superfund site* (tempat yang paling mendapatkan perhatian *Superfund*) yang paling rusak, (3) Identifikasi *Potentially Responsibility Parties* (PRP) pada setiap tempat yang rusak (termasuk *Superfund site*), (4) menegosiasi penyelesaian perbaikan kerusakan lingkungan PRP, (5) memerintahkan PRP untuk memperbaiki tempat yang rusak, (6) menuntut PRP biaya penggantian dan denda perbaikan tempat yang rusak, bila PRP menolak.

Tempat tersebut selanjutnya dirangking berdasarkan layak tidaknya digunakan untuk tujuan yang lain (setelah mempertimbangkan sejumlah faktor). Bila tempat tersebut memerlukan pembersihan dan perbaikan EPA bisa minta pemilik atau pihak yang lain bertanggung jawab terhadap tempat yang terkontaminasi tersebut.

Dari uraian di atas, semua calon pembeli dan mereka yang akan menjadi pemilik berikutnya (kreditur penyita) harus terlebih dahulu mengevaluasi kemungkinan kewajiban lingkungan dari setiap tanah dan *property* sebelum mereka peroleh, jangan sampai mereka secara finansial dan hukum bertanggung jawab terhadap masalah-masalah lingkungan di masa yang akan datang.

Isu Lingkungan dalam Laporan Keuangan. Pedoman akuntansi dan pelaporan terhadap *accrual* dan *Disclosure* kewajiban lingkungan terdapat pada beberapa sumber menurut Munter, Sacasas and Garcia (1996 36-50), yaitu :

1. SFAS No. 5 mengenai akuntansi untuk *contingency*.
2. FASB *interpretation* No. 14 mengenai estimasi jumlah kerugian yang dapat diterima.
3. FASB *interpretation* No. 39 mengenai *off setting* jumlah yang berhubungan dengan kontak-kontrak tertentu.

Accrual of Environmental Cost. Sebagaimana dalam evaluasi *contingency* yang lain, pedoman utama dapat ditemukan dalam SFAS No. 5 yang menyatakan bahwa rugi *contingency* harus diakui bila kerugian tersebut dapat dinyatakan *probable* dan dapat ditaksir jumlahnya. Memang SFAS No. 5

dapat menjadi pedoman yang cukup dalam melakukan evaluasi banyak kewajiban *contingency*, tetapi ketika diterapkan pada kewajiban lingkungan, perusahaan dihadapkan dengan banyak kesulitan karena perubahan aturan dan perundang-undangan dan perubahan teknologi. Dalam hal ini Barth, McNichols and Wilson (1997:72-81) menyatakan bahwa sulitnya estimasi kewajiban lingkungan karena total biaya perbaikan tempat pembuangan yang rusak jumlahnya besar, sangat tidak pasti dan tidak diketahui sepenuhnya selama 30 tahun atau lebih ke depan. Sekali perusahaan masuk dalam kelompok PRP, maka perusahaan tersebut akan menghadapi ketidakpastian bagian alokasi biaya perbaikan yang dibebankan kepadanya.

Dari uraian di atas untuk tujuan pelaporan kewajiban lingkungan nampak bahwa semua perusahaan perlu hati-hati dalam melakukan evaluasi kegiatannya untuk menentukan apakah terdapat kewajiban lingkungan. Bila perusahaan dapat mengidentifikasi adanya masalah lingkungan dan ternyata perusahaan harus berpartisipasi untuk melakukan pembersihan akibat pencemaran, maka perusahaan harus menentukan apakah *accrual* tepat untuk digunakan, kecuali jumlahnya tidak material. Munter, Sacasas and Garcia (1996:36-50) berpendapat bahwa mengakui jumlah taksiran yang kasar (yang nantinya perlu direvisi) merupakan pendekatan akuntansi yang lebih baik daripada menunggu informasi yang lebih teliti tersedia pada waktu kemudian.

Disclosure. Apakah *disclosure* kewajiban lingkungan perlu disediakan berdasarkan *site* tertentu (*site-specific base*)? Namun cara ini akan memicu terjadinya biaya legal dan biaya lain yang tidak terjadi selama ini, yaitu perusahaan khawatir langsung dimasukkan ke dalam PRP oleh EPA atau bahkan masuk dalam kategori prioritas *Superfund*, sehingga konskuensinya bagi perusahaan sangat mahal.

Pembersihan lingkungan dapat dipisahkan menjadi dua kelompok yaitu (1) *superfund site* (*site* lain yang pembersihannya sesuai dengan arah pemerintah) dan (2) *site* yang memerlukan pembersihan dengan cara lain. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keterlibatan perusahaan dalam pembersihan sudah menjadi masalah publik. Jadi argumen ini menyatakan bahwa *disclosure* berdasarkan tempat tertentu diperlukan ketika perusahaan dilibatkan pembersihan *site* oleh *superfund*.

Disclosure lingkungan dalam praktik; seiring dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kepedulian lingkungan dan semakin diaturnya masalah lingkungan dalam bentuk undang-undang, maka jumlah *disclosure* lingkungan dalam *annual reports* meningkat sejak 1989 (Gamble et al 1995). Sedangkan menurut *survey* KPMG selama 1994-1995 perusahaan-perusahaan yang *disclose* lingkungan di UK semakin meningkat, tetapi kurangnya standar atau pedoman, bersamaan dengan adanya ketidakpastian kepada siapa *disclose* lingkungan tersebut ditujukan, membuat pelaporan isu lingkungan tersebut

sangat bervariasi (anonymous,1996). Sedangkan dari sisi manajemen, luasnya *disclose* kewajiban lingkungan berhubungan dengan 4 faktor yaitu (1) peraturan, termasuk tindakan pemaksaan, (2) peradilan dan negosiasi, (3) implikasi pasar modal dan (4) pengaruh peraturan yang lain. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa seiring dengan semakin banyaknya peraturan-peraturan dan pemaksaan hukum, jumlah *disclose* isu lingkungan semakin meningkat, tetapi karena pedomannya belum jelas dan kepada siapa *disclose* tersebut ditujukan. Maka *disclose* isu lingkungan masih sangat variatif. Untuk itu perlu pedoman yang jelas dalam pelaporan lingkungan beserta menentukan secara jelas siapa user isu lingkungan yang sebenarnya.

Perspektif Sosial - Pertanggungjawaban Sosial

Pertanggungjawaban sosial bukan merupakan fenomena yang baru, tetapi merupakan akibat dari semakin meningkatnya isu lingkungan di akhir 1980-an. Pertanggungjawaban sosial merupakan manifestasi kepedulian terhadap tanggung jawab sosial dari perusahaan. Sejarah telah mencatat perkembangan hubungan organisasi dengan masyarakat dan berkembangnya akuntansi untuk pertanggungjawaban sosial. Seakan-akan akuntansi pertanggungjawaban sosial telah berkembang dengan tiba-tiba dan belum mendapatkan perhatian yang serius dari profesi. Namun demikian akuntansi untuk pertanggungjawaban sosial telah mengarah pada proses komunikasi pengaruh sosial dan lingkungan kegiatan ekonomi organisasi kepada kelompok kepentingan tertentu dalam masyarakat dan kepada masyarakat secara luas (Rob Gray et.al, 1996:112). Akuntansi untuk pertanggungjawaban sosial merupakan perluasan pertanggungjawaban organisasi (perusahaan) di luar batas-batas akuntansi keuangan tradisional, yaitu menyediakan laporan keuangan tidak hanya kepada pemilik modal khususnya pemegang saham. Perluasan ini didasarkan pada anggapan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab yang lebih luas dan tidak sekedar mencari uang untuk para pemegang saham.

Salah satu tujuan akuntansi untuk tujuan sosial adalah untuk melakukan pertanggung-jawaban sosial organisasi. Pertanggungjawaban sosial timbul jika organisasi mempunyai tanggung jawab, bila organisasi merasa tidak memiliki tanggung jawab maka tidak akan ada pertanggungjawaban sosial. Untuk itu model pertanggungjawaban sosial harus eksplisit. Pandangan tentang sifat dan luasnya tanggung jawab sosial dari suatu organisasi tergantung pada bagaimana seseorang memandang dunia, seperti apa dunia ini sebagaimana diyakininya. Dalam hal ini memang terdapat perbedaan yang besar pada setiap kelompok masyarakat. Berikut ini beberapa kelompok masyarakat yang berbeda memandang hubungan organisasi-masyarakat :

1. Kelompok kapitalis murni adalah mereka yang melihat demokrasi ekonomi liberal sebagai cita-cita yang ideal tentang bagaimana dunia berlangsung dan suatu cara yang seharusnya demikian. Dalam perusahaan swasta para eksekutif adalah karyawan pemilik. Eksekutif tersebut memiliki tanggung jawab langsung dengan majikannya. Tanggung jawab tersebut adalah untuk menjalankan bisnis sesuai dengan keinginan majikan, yang secara umum eksekutif harus dapat menghasilkan uang sebanyak mungkin dengan cara yang sesuai dengan aturan dasar masyarakat yang melekat dalam hukum dan kebiasaan etik (Friedman, 1970:122-126). Namun demikian pemegang saham tentu tidak akan memberikan toleransi suatu jumlah yang digunakan kegiatan yang bersifat non profit yang dapat mengurangi deviden (Hetherington, 1973:48-58). Pandangan ini tentu bertentangan dengan semangat tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat. Pandangan yang bijaksana adalah pandangan yang mempertimbangkan kesejahteraan dan stabilitas ekonomi jangka panjang yang hanya dapat dicapai dengan diterimanya tanggung jawab minimal yang lebih luas (biasanya minimal).

Isu yang penting adalah bagaimana memenuhi kelompok-kelompok yang memiliki *value* yang berbeda-beda yaitu *value* yang berhubungan dengan ekonomi pasar seperti efisiensi, kebebasan, inovasi, desentralisasi, insentif dan pencapaian individual. Sedangkan *value* yang lain berhubungan dengan hak politik dan sosial seperti kesamaan peluang, hak setiap individu untuk berpartisipasi dalam keputusan yang penting yang mempengaruhi hidupnya, hak untuk sehat sesuai standar, pendidikan, martabat dan *privacy* pribadi. Apa yang terus menerus dihadapi adalah pilihan yang sulit dan hubungan yang diperlukan untuk mencapai keseimbangan di antara semua nilai-nilai tersebut. Pandangan ini dianggap sebagai pencerahan kepentingan pribadi oleh Gray et.al (1996:57).

2. Pendukung kontrak sosial yang memandang bahwa perusahaan dan organisasi lain ada sebagai kehendak masyarakat dan selanjutnya ditentukan sesuai keinginan masyarakat. Menurut Shocker and Sethi (1973:97-105) bahwa setiap institusi sosial dan bisnis tanpa kecuali beroperasi dalam lingkungan masyarakat melalui kontrak sosial yang mengatakan bahwa *survival* dan pertumbuhan institusi tersebut didasarkan pada :
 - a. Penyampaian beberapa hasil akhir yang secara sosial diinginkan kepada masyarakat secara umum.
 - b. Distribusi manfaat ekonomi, sosial dan politik kepada kelompok-kelompok agar mendapatkan *power*.

Dalam masyarakat yang dinamis, tidak ada sumber kekuasaan institusional atau kebutuhan terhadap pelayanan yang sifatnya

permanen. Selanjutnya suatu institusi harus secara terus menerus memenuhi pengujian legitimasi dan relevansi dengan menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan jasanya dan perusahaan telah mendapatkan pengesahan dari masyarakat (Shoeker and Sethi, 1973:97-105). Setiap perusahaan besar harus dianggap sebagai perusahaan sosial; yaitu sebagai suatu entitas yang keberadaannya dan keputusannya dapat dijustifikasi (dipengaruhi oleh) sejauh perusahaan tersebut mampu melayani publik atau tujuan sosial (Dahl, 1972: 17-25).

3. *Social ecologist* adalah mereka yang peduli terhadap lingkungan manusia. Dalam arti yang sangat luas mereka melihat akan terjadi masalah yang serius jika tak ada satupun yang dikerjakan dalam interaksi organisasi lingkungan dan mereka berpendapat bahwa organisasi yang besar secara khusus telah terpengaruh dengan adanya masalah sosial dan lingkungan.

Kerusakan mendasar akibat cara perusahaan beroperasi dengan etos ekspansinya tidak bisa terus menerus berlangsung, sehingga cara-cara tersebut harus segera dihentikan agar tidak menyangsakan umat manusia. Upaya untuk menghentikan kerusakan-kerusakan tersebut merupakan pandangan yang bijaksana, menyelamatkan generasi di masa yang akan datang, humanis dan melakukan perubahan-perubahan yang terukur (Goldsmith, 1972:15)

4. Sosialis cenderung mempercayai bahwa dominasi sosial, ekonomi dan politik saat ini oleh modal adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip sosialis, sehingga diperlukan *readjustment* yang signifikan terhadap pemilikan dan struktur masyarakat.
5. *Radical feminist* yang memandang bahwa sistem ekonomi, sosial, politik dan bisnis merupakan *construct* pria yang menekankan pada agresi, konflik, persaingan dan sebagainya sehingga menolak *feminine values* seperti keharuan, cinta, kerjasama dan nilai lainnya. Mereka memandang bahwa tidak ada kebijaksanaan dan cara yang penuh kasih dalam mengelola dunia ini.

Makna khusus dalam sistem bisnis yang diharapkan secara holistik adalah *sustainability*. *Sustainability* menjadi sangat penting karena, (1) *sustainability* menjadi agenda politik dan bisnis dunia, (2) *sustainability* secara universal dapat diterima (Gray et.al, 1996). Namun demikian *sustainability* seperti serigala berbulu domba yaitu (1) walaupun *sustainability* secara umum digunakan untuk merujuk isu planet bumi, tetapi juga merupakan konsep sosial yang penting yaitu *sustainability* dapat dibagi menjadi elemen sosial (*eco-justice*) dan elemen lingkungan (*eco-efficiency*) (Gladwin, 1993), (2) terdapat *gap* yang luas antara pola konsumsi dan produksi saat ini di satu sisi dengan *sustainability* sebagian *way of life* di sisi lain.

Dari uraian di atas, pertanggungjawaban sosial menjadi sangat penting. Gray (1996:66) menyatakan bahwa perspektif *stakeholder* terdiri atas pandangan dunia yang berpusat ke perusahaan (analisis *stakeholder*) dan pandangan dunia yang berpusat ke masyarakat (pertanggungjawaban). Dari pandangan perusahaan seseorang berkepentingan untuk menilai pertanggungjawaban perusahaan kepada *stakeholder*-nya. Untuk itu perusahaan harus mengetahui apa yang diinginkan oleh *stakeholder*-nya agar dapat mengelola laporan pertanggungjawabannya.

Agar perusahaan mengetahui apa yang diinginkan oleh *stakeholder*-nya, perusahaan harus dapat menilai *substantive environment* yang terdiri atas *primary level*, *secondary level* dan *tertiary level* (Gray et.al 1996:66-70). Pada *primary level*, digambarkan interaksi medium perusahaan *manufacturing* dengan lingkungan yaitu pemegang saham, pemerintah otoritas lokal, bank, dana pensiun dan asuransi, konsumen, karyawan, industri-industri nasional, perusahaan pembuat barang modal, perusahaan pembuat barang dan jasa (barang konsumsi). Mereka memiliki hak untuk mendapatkan informasi pertanggungjawaban. Sedangkan dari sudut pandang perusahaan, mereka mempunyai pengaruh yang langsung dengan keberadaan dan kesuksesan perusahaan. Bagi perusahaan interaksi dengan lingkungannya berarti memelihara *goodwill* atau legitimasi.

Pada *secondary level* menggambarkan interaksi sosial perusahaan. Perusahaan beranggapan bahwa tujuan orientasi laba yang sempit berarti mengelola *stakeholder* hanya untuk jangka waktu yang pendek saja. *Secondary level* ini menggambarkan interaksi medium perusahaan *manufacturing* dengan lingkungannya yang lebih luas yaitu penggunaan infrastruktur, pengaruh estetika, kesehatan karyawan dan kepuasan status, opsi konsumen dan kesejahteraan, advertensi, sampah sisa, teknologi baru dan sumber-sumber, dan *social opportunity cost*. Akhirnya pada *tertiary level*. Pada level ini interaksi antara organisasi secara individual dengan lingkungannya tidak sepenting interaksi sistem ekonomi organisasi secara keseluruhan. *Tertiary level* ini menampakkan teori yang mendasari keberadaan organisasi. Pengaruh yang berhubungan dengan sistem organisasi demikian tidak kelihatan dan sulit untuk dipahami.

Tertiary level ini menggambarkan interaksi dalam sistem organisasional yang lebih kompleks yaitu menyangkut seperti apa yang kita inginkan, sehingga menghasilkan pilihan dan sistem di masa yang akan datang. Interaksi tersebut berhubungan dengan: kualitas kebebasan, sikap (moral, pendidikan, budaya dan estetika), tingkat informasi (berita), warisan budaya, dunia ketiga, sistem, pilihan individu, kesehatan, lingkungan, sistem hukum yang adil.

Beberapa aspek penting dalam pelaporan untuk pertanggungjawaban sosial meliputi subyek laporan, *audience* laporan, isi laporan,

motivasi laporan dan *Reliability* (Gray et.al, 1996:83). Semakin jelas aspek-aspek tersebut, semakin sesuai laporan untuk pertanggungjawaban sosial dengan tuntutan lingkungannya.

Subyek pelaporan untuk pertanggungjawaban sosial meliputi pemegang saham, investasi, karyawan, konsumen, masyarakat, lingkungan; pengaruh bisnis, lingkungan dan sosial secara total; kebijakan umum, etika dan standard, pemerintah dan hubungan dengan negara lain. Sedangkan *audience* pelaporan untuk pertanggungjawaban sosial adalah pemegang saham, pasar finansial dan *intermediary*, karyawan, manajemen, serikat buruh; calon karyawan, kelompok-kelompok kepentingan, *pressure group*, media, pemerintah, badan pembuat peraturan, pesaing, perusahaan lain sejenis, *industry group*, konsumen, *supplier* dan masyarakat secara umum. Isi pelaporan untuk pertanggungjawaban sosial mencakup laporan narasi mengenai pernyataan-pernyataan, tujuan dan fakta-fakta, laporan kuantitatif perbandingan target dan realisasi, dan laporan keuangan. Motivasi pelaporan untuk pertanggungjawaban sosial adalah untuk pertanggungjawaban, etika dan motivasi lain yang dibutuhkan masyarakat.

Reliability berhubungan dengan seberapa jauh seseorang mempercayai suatu informasi. *Reliability* pelaporan untuk pertanggungjawaban sosial didasarkan pada data taksiran dan *partial*, laporan hasil dari internal audit dan sistem informasi dan laporan yang telah diaudit oleh pihak eksternal.

KESIMPULAN

Dalam upaya menyempurnakan laporan keuangan untuk meningkatkan kegunaannya telah dikembangkan suatu model yang lebih menyeluruh yang disebut *Business reporting* yang isinya di samping laporan keuangan adalah informasi non finansial dan informasi *forward looking*. Sedangkan upaya untuk memasukkan informasi lingkungan diperlukan standar yang lebih lengkap agar terdapat keseragaman perusahaan-perusahaan dalam memasukkan masalah lingkungan dalam laporan keuangan baik *diaccrued* maupun *disclosed*. Laporan untuk pertanggungjawaban sosial memang masih sangat ideal, tetapi dengan memperhatikan tuntutan masyarakat terhadap peran nyata dan kepedulian perusahaan untuk kepentingan sosial, sudah waktunya laporan keuangan memasukkan isu pertanggungjawaban sosial.

Dari uraian di atas, nampak bahwa laporan keuangan menjadi sangat luas dan batas-batasnya tidak jelas. Namun penulis telah membuka wacana permasalahan akuntansi yang sangat luas. Dalam praktik diperlukan penyempurnaan laporan keuangan yang memiliki dimensi pragmatik, lingkungan dan sosial sebagaimana diuraikan di atas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous. 1996. "UK Business Lag on Green Reporting." *Management Accounting* Jul/Aug Vol.7:5-7.
- Beth, Mary E., Maureen F. McNichols and G. Peter Wilson. 1997. "Factors Influencing Firms' Disclosure about Environmental Liabilities." *Review of Accounting Studies* No.2:72-81.
- Dahl, R.A. 1972. "A Prelude to Corporate Reform." *Business and Society Review* Spring:58. Dalam Gray, Rob, Dave Owen and Carol Adams. 1996. "Accounting and Accountability", *Change and Challenge Incorporate Social and Environmental Reporting*. New York: Prentice Hall: 58.
- Drucker, Peter F. 1995. "The Information Executive Truly Need." *Harvard Business Review* Jan-Feb:26-27.
- FASB. 1978. "SFAC No.1."Objective of Financial Reporting By Business Enterprise." FASB of The Financial Accounting Foundation Nov:3021-3038.
- FASB. 1980. "SFAC No.2. Qualitative Characteristic of Accounting Information." FASB of The Financial Accounting Foundation Mei:3039-3079.
- FASB. 1984. "SFAC No.5 Recognition and Measurement in Financial Statement of Business Enterprise." FASB of The Financial Accounting Foundation Dec:3147-3182.
- Foster, George. 1986. *Financial Statement Analysis*. New York: Prantice-Hall International, Inc.:152-153.
- Friedman. 1970. "The Social Responsibility of Business is to Increase Its Profit." Pp. 122-126 in *New York Time Magazine*. Dalam Gray, Rob, Dave Owen and Carol Adams. 1996. "Accounting and Accountability", *Change and Challenge Incorporate Social and Environmental Reporting*. New York: Prentice Hall: 97.
- Gamble, George O.; Devaun Kite and Robin R. Radke. 1995. "Environmental Disclosures in Annual Reports and 10Ks: An Examination." *Accounting Horizon* Sept, V. 9, N.3:34-54.
- Gladwin, Thomas N. 1993. "Envisioning The Sustainable Corporation" in *Managing For Environment Excellence*. Washington, DC: Island Press:. Dalam Gray, Rob, Dave Owen and Carol Adams. 1996. "Accounting and Accountability", *Change and Challenge Incorporate Social and Environmental Reporting*. New York: Prentice Hall: 61.

- Goldsmith, et al. 1972. *Blueprint For Survival*. Harmondsworth: Penguin.
- Dalam Gray, Rob, Dave Owen and Carol Adams. 1996. "Accounting and Accountability", *Change and Chalange Incoporate Social and Environmental Reporting*. New York: Prentice Hall: 58.
- Gray, Rob, Dave Owen and Carol Adams. 1996. "Accounting and Accountability", *Change and Chalange Incoporate Social and Environmental Reporting*. New York: Prentice Hall:1-339.
- Gray, R.H. 1994. "The Accounting Profession and The Environmental Crisis (or Can Accountancy Save The World)." *Meditari* :1-51. Dalam Gray, Rob, Dave Owen and Carol Adams. 1996. "Accounting and Accountability", *Change and Chalange Incoporate Social and Environmental Reporting*. New York: Prentice Hall:75.
- Hetherington, J.A.C. 1973. "Corporate Social Responsibility Stakeholder and The Law." *Journal countemporary Business* Winter:48-58. Dalam Gray, Rob, Dave Owen and Carol Adams. 1996. "Accounting and Accountability", *Change and Chalange Incoporate Social and Environmental Reporting*. New York: Prentice Hall:57.
- Lee, T.A. 1978. *The Cash Flow Alternative For Corporate Financial Reporting*. Amsterdam: Martinus Nijhoff. Dalam Gray, Rob, Dave Owen and Carol Adams. 1996. "Accounting and Accountability", *Change and Chalange Incoporate Social and Environmental Reporting*. New York: Prentice Hall:75.
- Lev, Bruch. 1989. "On The Usefulness of earnings and Earning Reserach: Lessons and Directions From Two Decades of Empirical Research." *Journal of Accounting Research* September, Vol 27:153-188.
- Munter, Paul; Rene Sacasas and Elaine Gracia. 1996. "Accounting and Disclosure of Environmental Contingencies." *CPA Journal* :36-50.
- Noll, Daniel J. and Jerry J. Weygrandt. 1997. "Business Reporting What Come Next?" *Journal of accountancy* Feb:47-50.
- Puxty, AG and Laughlin. 1983. "A Rational Construction of The Decision Usefulness Criterion." *Journal of Business, Finance and Accounting* :543-560. Dalam Gray, Rob, Dave Owen and Carol Adams. 1996. "Accounting and Accountability", *Change and Chalange Incoporate Social and Environmental Reporting*. New York: Prentice Hall: 75.
- Sethi, Shocker and. 1973. "An Approach To Incorporating Societal Preferences in Developing Corporate Action Strategies." *California management Review* Summer:97-105. Dalam Gray, Rob, Dave Owen and Carol Adams. 1996. "Accounting and Accountability",

Change and Chalange Incoporate Social and Environmental Reporting.
New York: Prentice Hall:58.

Sterling, R. 1972. "Decision Oriented Financial Accounting." *Accounting Business Reserach Summer*. Dalam Gray, Rob, Dave Owen and Carol Adams. 1996. "Accounting and Accountability", *Change and Chalange Incoporate Social and Environmental Reporting*. New York: Prentice Hall:75.